

KEARIFAN LOKAL AKTIVITAS MASYARAKAT HINDU BALI SEBAGAI SUMBER BELAJAR PPKN*LOCAL WISDOM IN THE ACTIVITIES OF THE BALINESE HINDU COMMUNITY AS LEARNING SOURCES OF PANCASILA AND CIVIC EDUCATION***Usman Alhudawi, Elly Malihah**Program Studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas Pendidikan Indonesia
Jalan Setiabudhi Nomor 229, Bandung 40154 Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**Diterima : 02 Mei 2020
Disetujui : 29 Desember 2020**Keywords:**

Local Wisdom, Learning Resource, PPKn, Character

Kata Kunci:

Kearifan Lokal, Sumber Belajar, PPKn, Karakter

***) Korespondensi:**E-mail: usmanalhudawi@upi.edu

Abstract: this study aimed to examine the potential of local wisdom in the activities of the Balinese Hindu community in Serdang Bedagai Regency as a learning resource for Pancasila and Citizenship Education (PPKn). Researchers used a qualitative approach to ethnographic research methods. This research was conducted in Pegajahan Village, Pegajahan District, Serdang Bedagai Regency, North Sumatra. The results showed that the value of local wisdom in the activities of the Balinese Hindu community in Pegajahan Village could be contained in learning and strengthened the cultivation of various characters in PPKn learning. The integration of local wisdom values from the activities of the Balinese Hindu community in Pegajahan Village in the PPKn learning activities had the potential to succeed, however, there was an obstacle in its implementation.

Abstrak: kajian ini bertujuan mengkaji potensi kearifan lokal aktivitas masyarakat Hindu Bali di Kabupaten Serdang Bedagai sebagai sumber belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian etnografi. Penelitian ini dilakukan di Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kearifan lokal dalam aktivitas masyarakat Hindu Bali Desa Pegajahan dapat dimuat dalam pembelajaran dan menguatkan penanaman berbagai karakter dalam pembelajaran PPKn. Integrasi nilai kearifan lokal aktivitas masyarakat Hindu Bali Desa Pegajahan dalam kegiatan pembelajaran PPKn berpotensi berhasil, namun demikian ada hambatan dalam pelaksanaannya.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu bangsa yang memiliki tatanan masyarakat multikultur yang terdiri atas beragam suku, agama, ras, kepercayaan. Hal ini merupakan identitas nasional dan sumber kekayaan nasional. Setiap entitas atau masyarakat yang berbeda tersebut mempunyai nilai-nilai yang terus dipelihara sehingga menjadi nilai arif dalam komunitasnya. Kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan

masyarakat (Sibarani, 2012). Kearifan tersebut dipegang teguh, diyakini keberadaan dan kebenarannya, dan diwariskan secara turun-temurun oleh komunitas dan masyarakat.

Salah satu masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh kearifan lokal adalah masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. Sebagai daerah yang memiliki moto *Negeri Bertuah Tanah Beradat* Kabupaten Serdang Bedagai berpegangan pada visi pembangunan modern dengan menyelaraskan pembangunan manusia sesuai nilai luhur. Pada mulanya,

Serdang Bedagai yang merupakan kabupaten di Sumatera Utara bagian timur dihuni oleh masyarakat suku Melayu. Namun, dengan adanya perkembangan zaman dan terjadinya migrasi mengakibatkan pembauran dengan suku-suku lainnya dalam jumlah besar seperti Batak Toba, Karo, Simalungun, Jawa, Banjar, Minang, dan lain-lain. Hal ini menjadi dasar pendorong terbentuknya suatu tata nilai baru atau kearifan lokal baru karena migrasinya suatu kelompok masyarakat tentu juga membawa kebudayaan dan nilai-nilai asli dari sumber awal masyarakat itu berasal.

Fenomena unik akibat terjadinya migrasi di Kabupaten Serdang Bedagai adalah eksistensi dan keberadaan kelompok masyarakat Suku Bali yang beragama Hindu. Dikutip dari laman medan.tribunnews.com, komunitas ini mulai mendiami Desa Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sekitar tahun 1963. Asal muasal kedatangan masyarakat Hindu Bali merupakan hasil program transmigrasi yang digagas Presiden Soekarno (Magribi, 2019). Kesediaan kelompok ini mengikuti program transmigrasi dilatarbelakangi peristiwa meletusnya Gunung Agung pada tahun 1963. Peristiwa itu memaksa masyarakat untuk meninggalkan kampung halaman mereka yang berada kaki gunung dan mencari sumber kehidupan baru di wilayah lain dengan mengikuti program transmigrasi.

Keberadaan kelompok masyarakat Hindu Bali di Kabupaten Serdang Bedagai masih menunjukkan aktivitas yang mencirikan nilai-nilai dan kebudayaan yang mereka miliki meskipun mereka berada pada jarak yang cukup jauh dengan kampung halaman asalnya. Secara kuantitatif, keberadaan masyarakat Hindu Bali di Desa Pegajahan dapat dikatakan minoritas. Namun, masyarakat Hindu Bali dapat diterima dan bergabung dengan kelompok masyarakat lain di sekitarnya yang memiliki latar belakang suku maupun agama yang berbeda. Aktivitas masyarakat Hindu Bali di Kabupaten Serdang yang sarat akan nilai-nilai luhur merupakan kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Selain itu kearifan lokal yang memiliki nilai kompleks pada suatu tatanan masyarakat dapat menjadi sumber utama atau penguat kompetensi-kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kompetensi tersebut meliputi; (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu;

(2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris; (3) pengembangan karakter dan sikap mental tertentu; serta (4) komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional (Budimansyah & Suryadi, 2008). Kompetensi-kompetensi tersebut dapat digolongkan pada tiga komponen utama yang perlu dipelajari dalam PPKn, yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions*.

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) merupakan materi substansial yang harus diketahui oleh siswa sebagai warga negara. Pada prinsipnya pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara adalah mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) adalah keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang dimiliki tersebut menjadi sesuatu yang bermakna dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterampilan kewarganegaraan mencakup keterampilan intelektual (*intellectual skills*) dan keterampilan partisipasi (*participation skills*). Watak kewarganegaraan adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi (Perangin-angin, 2017). Ketiga kompetensi tersebut perlu dibelajarkan kepada siswa agar dapat bermanfaat bagi berlangsungnya proses interaksi dan perkembangan sosial dalam masyarakat.

Secara ontologis, PPKn yang materi esensialnya adalah perilaku warga negara memiliki tiga domain yakni akademis, kurikuler, dan sosiokultural (Wahab, 2011; Winataputra, 2015). Pada domain sosiokultural pelaksanaan PPKn lebih adaptif, dinamis dan luwes dalam memberikan pengalaman belajar. Berdasarkan hal itu ranah nilai-nilai kearifan lokal dapat menawarkan pengalaman belajar PPKn yang dekat dengan sosiokultur siswa. Konsep pembelajaran yang baik itu dalam realisasinya harus dikaitkan dengan keadaan lingkungan. Pembelajaran berbasis lingkungan sekitar adalah suatu pembelajaran yang menggunakan objek belajar berupa pengalaman nyata, mengamati secara langsung, memperoleh data-data secara akurat baik secara mandiri atau pun berkelompok dalam lingkungan manusia (Juairiah, Yunus, & Djufri 2014). Salah satu dimensi penting dalam

lingkungan manusia adalah eksistensi budaya. Paulina Pannen menyebutkan bahwa pembelajaran budaya menjadi sebuah metode bagi siswa untuk mentransformasikan hasil observasi mereka ke dalam bentuk-bentuk dan prinsip-prinsip kreatif tentang alam (Suprayekti dkk, 2009). Dalam tinjauan ini maka pembelajaran PPKn di persekolahan sebenarnya dapat mewadahi nilai-nilai kearifan lokal pada suatu daerah sebagai sumber belajar.

Kearifan lokal dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar di sekolah melalui pembelajaran PPKn untuk membangun kompetensi kecerdasan warga negara yang komprehensif. Pada uraian di atas telah disampaikan bahwa masyarakat Hindu Bali tetap mempertahankan kebudayaan dan menjalani hidup dengan masyarakat yang berbeda keyakinan. Pada situasi ini kelompok masyarakat Hindu Bali di daerah ini menunjukkan kecerdasan kultural dan toleransi serta kemampuan menempatkan diri. Artinya masyarakat tersebut telah menerapkan komponen utama PPKn, yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions*. Masyarakat yang memiliki keragaman latar belakang suku, agama, ras (SARA) dituntut untuk memiliki komponen-komponen kompetensi warga negara secara tepat dalam rangka menghindari konflik. Sebagaimana yang telah dikemukakan Greetz bahwa secara alami di dalam masyarakat majemuk itu mengandung potensi konflik (Setiawan, 2012). Berdasarkan uraian latar belakang di atas menjadikan keberadaan komunitas Hindu Bali di Desa Pegajahan yang dapat hidup berdampingan dan masih melestarikan nilai dan kearifan lokalnya sebagai sumber belajar PPKn merupakan kajian yang menarik untuk dilakukan. Maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis potensi kearifan lokal masyarakat Hindu Bali sebagai sumber belajar PPKn dan mendeskripsikan pengintegrasian kearifan lokal masyarakat Hindu Bali dalam pembelajaran PPKn.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena bersifat mendalam dan khas dalam melihat realita di lapangan secara alamiah (Sugiyono, 2009). Penelitian ini menggunakan metode penelitian etnografi karena bertujuan mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasi pola-pola

perilaku pada kelompok berbudaya yang berkembang seiring berjalannya waktu (Creswell, 2015). Hal ini didasarkan kebutuhan peneliti dalam mendalami aktivitas dan kearifan lokal masyarakat Hindu Bali di Serdang Bedagai. Penelitian ini dilakukan di Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena sebagian besar kelompok masyarakat Hindu Bali di Serdang Bedagai berada di Desa Pegajahan dan sebagian kecil lainnya berada di desa sekitarnya.

Teknik wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan bentuk terstruktur maupun semi terstruktur untuk mengumpulkan data dari partisipan di lokasi penelitian. Hasil wawancara merupakan data utama pada penelitian ini (*data emic*). Pada penelitian ini observasi baik aktivitas nonpartisipan sampai partisipan digunakan untuk mengumpulkan data awal. Hal ini penting dilakukan untuk memperoleh data *etic* (informasi yang digunakan untuk interpretasi etnografer tentang perspektif partisipan (Creswell, 2015)). Peneliti juga menggunakan studi literatur dan studi dokumentasi sebagai tambahan dalam pengumpulan data.

Analisis data kualitatif diawali dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, kemudian menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2009). Metode etnografi digunakan dalam proses umum untuk mengembangkan deskripsi, menganalisis data untuk menentukan tema, dan memberikan interpretasi tentang makna informasi (Creswell, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Kearifan Lokal Masyarakat Hindu Bali sebagai Sumber Belajar PPKn

Secara global pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik (Wahab, 2011). Menurut Sumantri warga negara yang baik adalah warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama dan demokratis, dan Pancasilais sejati (Wahab, 2011). Warga negara

yang demikian itu akan terbentuk apabila warga negara telah menerima pendidikan dan informasi yang menunjang peningkatan kompetensi warga negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membentuk warga negara yang baik adalah melalui pembelajaran PPKn.

Menurut Cogan Pendidikan Kewarganegaraan lebih inklusif karena tidak hanya mencakup pengalaman di sekolah tetapi juga di luar sekolah, seperti pembelajaran nonformal/informal di keluarga, organisasi, masyarakat, media dan lain sebagainya (Budimansyah & Suryadi, 2008). Maka dari itu, aktivitas-aktivitas dalam masyarakat yang sarat akan nilai luhur dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar PPKn. Salah satu masyarakat yang dapat mampu memberikan pengalaman adalah masyarakat Hindu Bali di Desa Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai. Aktivitas masyarakat Hindu Bali di Desa Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yang mengandung kearifan lokal memiliki potensi sebagai sumber belajar PPKn baik di lingkungan persekolahan maupun di masyarakat.

Ada banyak nilai yang dapat digali dari aktivitas kebudayaan dan ritual keagamaan Hindu Bali yang dapat diinfiltrasi ke dalam pembelajaran PPKn. Sebagai kelompok minoritas, masyarakat Hindu Bali di Desa Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yang pada awalnya bekerja sebagai pekerja perkebunan kelapa sawit pada sebuah perusahaan perkebunan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerapkan beberapa ajaran dalam menjalani kehidupan. *Pertama*, ajaran *Tat Twam Asi*, yang memiliki arti kamu adalah aku dan aku dalam kamu. Ajaran ini bermakna kesamaan/kesetaraan antar manusia untuk saling menghargai dan melindungi. *Kedua*, ajaran *Tri Hita Karana*, artinya tiga penyebab kebahagiaan. Ajaran ini terdiri atas tiga nilai dasar yang menyebabkan hadirnya kebahagiaan pada kehidupan manusia. Kebahagiaan itu terbentuk ketika manusia menjaga hubungan baik dengan Tuhan, manusia menjaga hubungan dengan manusia, dan manusia menjaga hubungan dengan alamnya. *Ketiga*, ajaran *Tri Kaya Parisudha*, artinya tiga tuntunan perbuatan manusia. Ajaran ini menuntut agar manusia itu berpikir yang benar, berkata benar, dan berbuat benar.

Ketiga ajaran tersebut merupakan salah satu landasan keagamaan, kebudayaan, serta dalam kehidupan bermasyarakat komunitas Hindu

Bali di Kabupaten Serdang Bedagai. Realitas tersebut memiliki kesesuaian dengan semangat pembelajaran PPKn yang diantaranya untuk penanaman karakter toleransi kepada siswa. Pembelajaran PPKn diharapkan membangun karakter warga negara untuk dapat hidup bersama (*long life together*). Pilar ini merupakan penanaman kesadaran kepada siswa bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Untuk itu siswa harus mampu hidup bersama. Karena Indonesia memiliki keragaman etnis, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi, dan menerima perlu dikembangkan di sekolah (Japar, Fadillah, & Lakshita, 2019). Maka dari itu siswa harus ditanamkan untuk bersikap toleransi terhadap berbagai perbedaan.

Sikap dan kebiasaan saling menghormati teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Hindu Bali. Hal ini dibuktikan dengan tidak pernah ada pergesekan atau konflik yang terjadi disebabkan karena perbedaan ritual kebudayaan atau aktivitas ritual keagamaan. Sikap saling mendukung tampak antara masyarakat Hindu Bali dengan etnis dan agama lainnya. Dengan lingkungan yang heterogen masyarakat Desa Pegajahan hidup berdampingan dan membaaur. Pembauran itu dapat tergambarkan pada acara syukuran, *wiridan*, atau pesta dari masyarakat beragama Islam. Pada acara-acara tersebut anggota masyarakat Hindu Bali juga turut diundang berpartisipasi membantu dalam persiapan acara, dan begitu juga sebaliknya. Hal itu menunjukkan bahwa sikap sosial (jika meminjam standarisasi Kurikulum 2013 disebut dengan KI-2) dalam masyarakat Hindu Bali di Desa Pegajahan Serdang Bedagai tergolong baik. Sikap ini juga dapat dijadikan sumber belajar penanaman sikap sosial dalam pembelajaran PPKn.

Kondisi masyarakat Hindu Bali yang secara jumlah lebih kecil dibanding kelompok lain membuat diskusi dan kompromi dengan pemerintah desa dan masyarakat sekitar atas penyelenggaraan aktivitas kebudayaan/ritual-ritual keagamaan menjadi bagian penting. Selain untuk tujuan perizinan dan permisif, upaya itu juga dijadikan sarana untuk menjelaskan landasan serta penjelasan umum mengenai tatacara suatu ritual yang harus dilakukan. Ini menjadi suatu kebiasaan yang sudah ditradisikan menjadi hukum tidak tertulis dalam masyarakat Desa Pegajahan. Jauh sebelumnya, dalam pembangunan Pura

Dharmasaka sebagai tempat ibadah umat Hindu Bali Desa Pegajahan juga diadakan diskusi dan kompromi kepada masyarakat sekitar. Tidak hanya memperoleh kesepakatan untuk mendirikan tempat ibadah, namun pemerintah desa dan masyarakat sekitar juga ikut berpartisipasi dalam proses pembangunannya.

Hal di atas harus dilihat sebagai potensi menguatkan pembelajaran PPKn. Agar nilai toleransi dapat berhasil dengan baik maka sarana yang paling tepat adalah melalui jalur pendidikan secara umum, terutama pendidikan kewarganegaraan (Suharyanto, 2013). Maka guru PPKn dapat menguatkan materi tentang toleransi pada buku ajar dengan mengaitkan contoh dan pengalaman nyata aktivitas masyarakat Hindu Bali Desa Pegajahan yang menjaga nilai tersebut untuk hidup bersama. Hal ini sesuai dengan misi PPKn dalam membentuk warga negara yang baik dan sesuai dengan kondisi sosiokultur masyarakat Indonesia. Selain nilai toleransi, nilai yang masuk kepada kajian pembelajaran PPKn yakni konsep multikulturalisme.

Multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain (Totok, 2017). Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pegajahan. Masyarakat sekitar di luar komunitas Hindu Bali kerap mencari informasi-informasi dengan bertanya tentang aktivitas, tujuan dan makna kebudayaan, dan ritual-ritual keagamaan Hindu Bali. Dengan demikian masyarakat sekitar telah mengerti macam dan tujuan umum terhadap aktivitas-aktivitas komunitas Hindu Bali yang sering dilakukan.

Sebagai contoh, pertanyaan yang paling sering muncul yaitu alasan mengapa orang Hindu Bali ketika meninggal dunia secara umum jasadnya harus dibakar dan berbagai pertanyaan-pertanyaan lain. Rasa ingin mengetahui tersebut mengindikasikan nilai multikulturalisme menjadi berkorelasi dengan kondisi masyarakat Desa Pegajahan sehingga capaian karakter pada taraf memahami dan menghargai perbedaan berbagai latar belakang primordial dapat ditingkatkan dalam rangka membangun negara berkeadaban tinggi.

Realitas penghargaan pada tatanan kehidupan masyarakat yang beragam tersebut harus disebarluaskan melalui berbagai media,

terkhusus melalui pendidikan. Muatan-muatan nilai multikultural perlu dirancang dalam suatu strategi proses pembelajaran yang mendorong terjadinya internalisasi nilai-nilai (Anas, 2019). Dalam masyarakat plural upaya mewujudkan kerukunan hidup baik antar maupun internal umat beragama bukan suatu yang mudah karena banyak faktor yang terkait, misalnya faktor sosial, pendidikan, ekonomi, politik, terutama ideologi (baca mazhab) dari masing-masing pemeluk agama yang berbeda (Wiranata, 2018). Kesadaran dan perhatian serius dibutuhkan semua pihak baik pemerintah, tokoh agama, maupun masyarakat dalam mewujudkan tatanan berkehidupan yang lebih baik.

Berkenaan dengan itu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu: (a) lingkungan fisik (*physical environment*), (b) lingkungan sosial (*human environment*), dan (c) gaya pengajaran guru (*teaching style*) (Aly, 2005). Manajemen pembelajaran PPKn di era modern harus diperhatikan dalam mendorong terbentuknya warga yang paham akan multikulturalisme dan membentuk media praktik pembiasaan. Kebiasaan saling menghargai dalam masyarakat multikultur telah menginternalisasi dalam tatanan masyarakat Desa Pegajahan. Di awal rencana pembangunan rumah ibadah Hindu Bali Desa Pegajahan sedikit menimbulkan pembicaraan yang bernada kekhawatiran. Masyarakat sekitar sedikit mengkhawatirkan jika aktivitas dari pura akan menjadi sumber permasalahan di masyarakat. Namun setelah dilakukan diskusi dan pertemuan yang dihadiri kepala desa, camat, dan bersama masyarakat maka dicapai kesepakatan sehingga komunitas Hindu Bali Desa Pegajahan tidak pernah mengalami penolakan dalam bentuk aksi massa untuk membangun atau melaksanakan aktivitas ibadah di pura. Menurut Taufiqurrahman (dalam Ikhsan, 2017a) konflik permasalahan peribadatan ini muncul karena adanya sikap membangga-banggakan kelompok atau golongan yang tidak diposisikan sebagaimana mestinya.

Setelah mengkaji nilai multikultural, selanjutnya karakter yang dapat digali dari aktivitas masyarakat Hindu Bali adalah karakter cinta budaya dan cinta tanah air. Karakter yang perlu ditanamkan kepada seluruh siswa dalam mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang penting salah satunya adalah dengan

penerapan nilai cinta tanah air (Andreson & Ulfa, 2018). Dalam kitab *asas al-balaghah* karya Az-Zamarkashi menyatakan bahwa cinta tanah air yakni masing-masing orang mencintai tanah airnya, negeri asalnya dan tempat tinggalnya (Ikhsan, 2017b). Penanaman rasa bangga dan ikut menjaga nama baik bangsa menjadi elemen yang tidak terpisah pada pembelajaran PPKn. Salah satu yang harus terus dikuatkan untuk memenuhi tantangan perubahan zaman yang begitu cepat adalah penguatan ideologi bangsa yang memiliki nilai moral yang luhur untuk menguatkan karakteristik sebagai bangsa Indonesia (Alfaqi, Shofa, & Habibi, 2019). Konsep cinta budaya daerah sebagai bentuk pelestarian budaya nasional dapat dilibatkan pembelajaran PPKn.

Kegiatan pembelajaran dapat menggali contoh aktivitas masyarakat Hindu Bali di Desa Pegajahan yang terus mencintai kebudayaannya walaupun dalam latar kondisi yang berbeda dari daerah asalnya. Pada masyarakat Hindu Bali Desa Pegajahan aktivitas tradisi adat atau kegiatan keagamaan masih tetap dilaksanakan, meskipun ritual tidak selengkap dan semeriah seperti yang dilakukan di Bali. Kecintaan akan tanah air juga dapat ditinjau dari sejarah kedatangan masyarakat Hindu Bali di Desa Pegajahan yang taat dan patuh atas program pemerintah mentransmigrasikan masyarakat Hindu Bali Desa Pegajahan dari wilayah asalnya. Masyarakat Hindu Bali sampai ke Desa Pegajahan disebabkan kondisi Bali di tahun 1962 yang mengkhawatirkan akibat terjadi bencana alam yaitu meletusnya Gunung Agung. Keadaan Bali yang hancur menjadikan masyarakat kesulitan untuk mencari nafkah, maka saat itu Presiden Soekarno mentransmigrasikan masyarakat Bali ke berbagai lokasi tujuan seperti Lampung, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian kecil Sumatera Utara pada tahun 1963. Pada saat itu masyarakat Hindu Bali di Desa Pegajahan ini ditransmigrasi untuk dipekerjakan dalam program kontrak kerja di perusahaan perkebunan sawit milik BUMN. Kecintaan terhadap negara terealisasi dari sikap patuh kepada kebijakan pemerintahan dalam sejarah kedatangan di Desa Pegajahan.

Nilai yang dapat digali selanjutnya dari aktivitas komunitas Hindu Bali dan masyarakat sekitarnya adalah karakter warga negara demokratis. Warga negara yang demokratis akan

terbentuk manakala telah dibekali pengetahuan dan pembiasaan sikap demokratis. Pembudayaan sikap demokratis yang sering dikenal dengan istilah proses demokratisasi, dipahami sebagai kondisi yang di dalam prosesnya dibutuhkan media sebagai pendukung proses tersebut (Supangat & Halimi, 2017). Dalam hal ini pembelajaran PPKn merupakan sarana yang memiliki misi demokratisasi dan pendidikan demokrasi terhadap warga negara. Aktivitas masyarakat Hindu Bali Desa Pegajahan dapat dijadikan gambaran implementasi budaya demokrasi yang dapat dimasukkan ke dalam pembelajaran PPKn.

Perwujudan pembudayaan demokrasi terlihat dari dilibatkannya unsur masyarakat Hindu Bali dalam rapat-rapat desa untuk diminta pendapat dan masukan sebagai tokoh atau pemuka agama Hindu Bali. Hal tersebut menunjukkan adanya pendistribusian hak yang setara terhadap masyarakat Hindu Bali sebagai unsur masyarakat di Desa Pegajahan. Ruang keterlibatan pemuka agama Islam, pemuka agama Kristen, pemuka agama Hindu Bali mendapat perlakuan yang sama. Bahkan telah menjadi kebiasaan untuk memberi kesempatan terlebih dahulu dari tokoh, pemuka masing-masing agama untuk memberi kata sambutan/masukan terhadap pembangunan desa atau pembuatan aturan-aturan di Desa Pegajahan. Walaupun ruang atas ketelibatan dalam pemerintahan desa sangat terbuka namun di antara masyarakat Hindu Bali belum pernah ada yang menjadi kepala desa. Hal ini dikarenakan keterbatasan pemahaman tentang kenegaraan atau pun pemerintahan desa. Latar belakang bekal pengetahuan yang dibawa dari daerah asal hanya berkisar pada teknik kerja dan pengetahuan ajaran kepercayaan Hindu Bali.

Realitas tersebut sejalan dengan konsep masyarakat demokratis yang paham tentang peran dan keterlibatannya dalam tatanan masyarakat. Keterlibatan warga negara merupakan representasi dari warga negara yang baik, mereka mengetahui hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa (Thamrin, 2017). Keterlibatan komunitas Hindu Bali dalam masyarakat Desa Pegajahan ini membentuk kebiasaan unik pada upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus yang berbeda dibandingkan kebanyakan daerah di Kabupaten Serdang Bedagai. Pada bagian pembacaan doa, petugas doa terdiri dari atas tiga orang yang mewakili tiga agama (Islam, Kristen, Hindu).

Petugas yang membacakan doa diwakili satu petugas dari orang Islam dan dua petugas lainnya dari Hindu Bali dan Kristen berdiri mendampingi. Masyarakat Hindu Bali tidak merasa terkucilkan dalam ruang keterlibatan dalam pemerintahan dan dapat melibatkan diri dalam kemasyarakatan walaupun secara jumlah masyarakat Hindu Bali di Desa Pegajahan kecil.

Setelah pembahasan karakter demokratis, nilai selanjutnya yang dapat digali dari aktivitas masyarakat Hindu Bali di Desa Pegajahan dalam pembelajaran PPKn yakni karakter religius warga negara. Menurut Ramdani sebagai mata pelajaran berbasis karakter, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi salah satu solusi yang tepat dalam menanamkan nilai-nilai kepada peserta didik, termasuk nilai religius (Hendra, Indawadi, & Montessori, 2019). Aktivitas keagamaan yang dijalankan masyarakat Hindu Bali di Desa Pegajahan dapat dijadikan sumber belajar PPKn berkaitan dengan nilai ketaatan terhadap ajaran agama. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas keagamaan di Pura Dharmashaka yang masih tetap aktif melaksanakan ibadah dan ritual-ritual keagamaan Hindu Bali. Pura Dharmasha eksis dipergunakan peringatan-peringatan hari besar keagamaan. Selain pada hari besar Pura Dharmashaka mengadakan ibadah tertentu seperti sembahyang bulan purnama dan sembahyang bulan tilem (bulan gelap). Secara rutin Pura Dharmashaka dipergunakan warga umat Hindu Bali untuk bersembahyang tiap harinya yaitu aktivitas ibadah *Tri Sania*, ibadah pada tiga waktu yakni pada pukul 06.00 pagi, pukul 12.00 siang, dan pukul 18.00 sore.

Hal tersebut mencerminkan aktualisasi nilai ketuhanan yang tetap terjaga dan eksis ditengah kondisi sosial budaya masyarakat yang beragam. Menurut Yusuf pembentukan karakter religius dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor internal seperti kesadaran, motivasi dan kemauan dan faktor eksternal seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat (Ramdani, 2019). Keberadaan masyarakat Hindu Bali di Desa Pegajahan yang sebagai kelompok yang minoritas tidak mengurangi dan menghalangi keberlangsungan dan kepatuhan terhadap kewajiban keagamaannya. Nilai ini dapat diinternalisasikan oleh guru PPKn kepada siswa dalam menguatkan karakter religius siswa. Guru dapat menyesuaikan upaya penguatan religius dengan mencontohkan religiusitas

masyarakat Hindu Bali dalam pembelajaran PPKn. Hal tersebut juga merupakan salah satu cara menguatkan implementasi sila pertama Pancasila.

Nilai kearifan lokal selanjutnya yang dapat dilibatkan dalam aktivitas masyarakat Hindu Bali dengan pembelajaran PPKn yakni masyarakat yang memegang erat falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, falsafah Pancasila sangat berguna. Selain memuat nilai-nilai baik bangsa, Pancasila juga sebagai pendorong warga dalam mendukung cita-cita atau pun tujuan nasional karena falsafah Pancasila adalah landasan dasar berpikir segenap bangsa dan negara Indonesia (Sutijo, 2010). Di Pura Dharmashaka maupun di rumah masyarakat Hindu Bali terdapat patung Garuda Wisnu. Patung ini memiliki makna filosofis yang mendalam dalam keyakinan masyarakat Hindu Bali. Patung Garuda Wisnu merupakan gambaran dari Dewa Wisnu. Dewa Wisnu dalam kepercayaan masyarakat Hindu Bali merupakan dewa yang berhubungan pemeliharaan, perlindungan alam semesta. Dalam pandangan masyarakat Hindu Bali rancangan lambang Garuda Pancasila sebagai lambang negara terinspirasi dari kisah pewayangan Garuda Wisnu sebagai pemelihara alam semesta. Maka timbulnya pemaknaan lambang Garuda Pancasila dalam kehidupan bernegara sebagai simbol pemberi kekuatan perlindungan dan kekuatan untuk memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Integrasi Kearifan Lokal Masyarakat Hindu Bali Desa Pegajahan dalam Pembelajaran PPKn

Integrasi nilai kearifan aktivitas masyarakat Hindu Bali dengan PPKn dapat dijadikan solusi atas kebutuhan media dan sumber belajar pelajaran PPKn yang berkaitan dengan komponen sosiokultur masyarakat. Media pembelajaran adalah kumpulan berbagai jenis komponen yang ada di dalam lingkungan peserta didik sehingga mereka lebih terangsang untuk mengikuti pelajaran dengan baik (Lubis, 2019). Proses integrasi kearifan lokal aktivitas masyarakat Hindu Bali dalam pembelajaran PPKn dapat dilakukan dengan mengaitkan materi ajar PPKn dengan nilai kearifan lokal yang dijalankan masyarakat Hindu Bali Desa Pegajahan. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan pembelajaran dan

penguatan karakter-karakter yang dibangun dalam pembelajaran PPKn. Pengintegrasian kearifan lokal masyarakat Hindu Bali Desa Pegajahan dalam pembelajaran sekolah harus menyesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa atas ragam informasi yang siswa terima, kelas, dan jenjang perkembangan dalam mengolah informasi.

Sejak beberapa tahun lalu masyarakat Hindu Bali di Desa Pegajahan kerap dikunjungi siswa atau mahasiswa untuk memperoleh informasi tentang aktivitas kebudayaan, ritual-ritual keagamaan, maupun informasi tentang Pura Dhamashaka. Kegiatan ini mendorong siswa untuk belajar dan mengenal kebudayaan yang berbeda dari yang biasa mereka jalani. Metode ini dapat dioptimalkan dalam misi penanaman kesadaran hidup dalam kebudayaan yang beragam. Hal tersebut merupakan instrumen yang efektif untuk menanamkan kesadaran terhadap keragaman budaya dalam bentuk kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (Chotimah, 2018). Perlu ada pengetahuan dan kemauan untuk melihat potensi-potensi kearifan lokal aktivitas masyarakat Hindu Bali serta pelibatannya dalam pembelajaran bagi pelaksana pendidikan wilayah sekitar, baik guru maupun masyarakat. Kepekaan akan hal-hal yang dapat dijadikan sumber belajar PPKn merupakan salah satu kompetensi guru sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dirumuskan dalam Pasal 1 butir 20 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik, sumber belajar, dan lingkungan belajar.

Guru dan para pengambil kebijakan dunia pendidikan diharapkan memiliki pemahaman pelaksanaan pedagogi dengan keterkaitan lingkungan dan kebudayaan (Alfaqi, Shofa, & Habibi, 2019). Perhatian guru dan pengambil kebijakan dunia pendidikan tentang integrasi nilai dan kebudayaan yang ada di sekitar akan mendorong siswa berpikir kontekstual dan kritis terhadap fenomena di sekitarnya. Dengan demikian, budaya kewarganegaraan yang kritis dan memahami nilai kehidupan berbangsa dalam masyarakat berlatarbelakang beragam budaya akan terbangun. Tujuan integrasi kearifan lokal masyarakat Hindu Bali Desa Pegajahan dalam pembelajaran PPKn dilakukan bukan dalam ranah

menyebarkan ajaran budaya dan agama (misi dakwah). Tujuannya adalah mentransformasi nilai kebudayaan Indonesia yang multikultur. Memiliki sikap positif terhadap perbedaan suku, ras, dan agama mampu membawa individu-individu ke dalam komunitas dan membawa komunitas ke dalam masyarakat dunia yang lebih luas (Najmina, 2018). Pendidikan multikultural diselenggarakan dalam upaya mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memandang kehidupan dari berbagai perspektif budaya yang berbeda dengan budaya yang mereka miliki.

Integrasi kearifan lokal aktivitas masyarakat Hindu Bali di Desa Pegajahan dalam pembelajaran PPKn secara umum berkaitan untuk mendorong keberhasilan penanaman nilai Pancasila kepada siswa. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa nilai dasar Pancasila digali dari sumber nilai-nilai lokal Indonesia yang disepakati sebagai nilai-nilai umum yang berlaku secara nasional. Dengan kata lain, integrasi tersebut merupakan transformasi nilai-nilai luhur sehingga harus terus ditanamkan melalui cara-cara yang lebih kreatif supaya dapat diterima oleh generasi muda saat ini.

Dalam tinjauan teoritis, integrasi kearifan masyarakat Hindu Bali di Desa Pegajahan dalam pembelajaran PPKn masuk ke dalam pendekatan pembelajaran yang disebut etnopedagogi. Etnopedagogi adalah praktik pendidikan berbasis kearifan lokal yang melibatkan berbagai ranah. Etnopedagogi memandang kearifan lokal sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang diberdayakan demi kemaslahatan masyarakat (Furqon, 2015). Pendekatan etnopedagogi yang termuat dalam aktivitas masyarakat Hindu Bali Desa Pegajahan menawarkan cara lain membelajarkan PPKn kepada siswa. Menurut Daeng materi pembelajaran PPKn mengaitkan antara teori dengan praktik yang terjadi dalam kondisi nyata, hal ini pula ada hubungannya dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang sangat beragam dan majemuk seperti ras, suku, bahasa, etnis, dan lain-lain (Halimah & Anisah, 2018). Oleh karena itu integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran juga dapat membentuk karakteristik siswa yang siap dalam hidup pada kondisi masyarakat yang beragam yang berciri menghargai sesama manusia dan menghargai alam sekitarnya. Selain itu, integrasi kearifan lokal aktivitas masyarakat Hindu Bali

sebagai sumber belajar PPKn berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme yang diusung Piaget. Hal itu kuatkan dengan argumennya bahwa setiap individu menciptakan makna dan pengertian baru, berdasarkan interaksi antara apa yang telah dimiliki, diketahui, dan dipercayai, dengan fenomena, ide, atau informasi baru yang dipelajari (Suprayekti; dkk, 2009).

Saat ini, pembelajaran yang berkualitas adalah pendidik melibatkan siswa tanpa diskriminasi untuk mengeksplorasi masalah-masalah nyata dalam masyarakat mencari pemecahan masalah dengan menggunakan sumber belajar (Japar, Fadillah, & Lakshita, 2019). Integrasi kearifan lokal masyarakat Hindu Bali dengan pembelajaran PPKn dapat menjawab kebutuhan pembelajaran yang berkualitas. Proses pembelajaran yang berkualitas menuntut dihadapkannya elemen keluarga dan lingkungan dalam kesatuan proses belajar. Keluarga dan lingkungan juga harus disiapkan dalam mewujudkan proses belajar yang demikian. Lingkungan masyarakat Hindu Bali telah terbiasa digunakan sebagai sumber belajar. Menurut pemaparan Mangku I Wayan Gio sebagai pemuka agama Hindu Bali, dirinya belakangan sering menerima anak-anak sekolah dasar (SD) dari lingkungan sekitar. Kegiatan tersebut berlangsung karena dalam kurikulum SD sekarang terdapat tema-tema pelajaran yang berkaitan dengan budaya dan lingkungan sekitar. Selain para siswa dari sekitar, beberapa kali ada kunjungan dari rombongan siswa SMP dan SMA yang berasal dari Kabupaten Serdang Bedagai maupun luar wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Namun yang lebih sering berkunjung adalah mahasiswa berbagai universitas di sekitar Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, secara tidak langsung aktivitas masyarakat Hindu Bali/Pura Dhamashaka telah biasa untuk dijadikan sebagai sumber belajar oleh sekolah maupun perguruan tinggi.

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan agar disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di setiap daerah. Amanat ini dapat dijadikan peluang pemerintah daerah mengembangkan kualitas pendidikan di daerahnya dengan nilai-nilai budaya. Namun potensi penguatan sumber pembelajaran PPKn dengan aktivitas masyarakat Hindu Bali di Desa Pegajahan ini belum mendapat perhatian lebih dari pemerintah

Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya bidang pendidikan. Padahal, pendekatan belajar tersebut akan berdampak besar ketika pengambil kebijakan pendidikan di daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk mensosialisasikan kepada guru-guru PPKn sehingga mereka memiliki kepekaan dalam melihat aktivitas kebudayaan/keagamaan sebagai sumber belajar.

Aktivitas masyarakat Hindu Bali sebagai sumber belajar PPKn yang masih dijalankan dengan asas sukarela kerap menimbulkan hambatan. Hambatan yang paling mendasar adalah penyesuaian waktu luang. Kerap kali terjadi kesulitan untuk menyesuaikan waktu/kesempatan dengan pemuka agama/tokoh/masyarakat Hindu Bali karena aktivitas lain yang mereka miliki, sehingga kerap kali ada sekolah/mahasiswa yang datang harus menunggu atau pun sama sekali tidak dapat bertemu. Keterbatasan dalam pengelolaan, narahubung, dan informasi tentang masyarakat Hindu Bali menjadi salah kesulitan untuk mendatangi dan melakukan proses pembelajaran secara langsung pada masyarakat Hindu Bali di Desa Pegajahan. Namun, pada dasarnya masyarakat Hindu Bali di Desa Pegajahan senang dapat memberikan informasi tentang nilai arif aktivitas masyarakat Hindu Bali dan tentang Pura Dhamashaka. Maka dari itu, perlu ada sinergi antara masyarakat Hindu Bali Desa Pegajahan, guru, sekolah, dan pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi masyarakat Hindu Bali Desa Pegajahan sebagai sumber belajar. Forum Musyawarah Guru Mata Pelajarab PPKn Kabupaten Serdang Bedagai juga perlu menyosialisasikan keberadaan dan potensi masyarakat Hindu Bali Desa Pegajahan sebagai sumber belajar.

KESIMPULAN

Nilai-nilai yang terkandung dalam aktivitas masyarakat Hindu Bali di Desa Pegajahan berpotensi untuk dilibatkan sebagai sumber belajar PPKn. Integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran PPKn dengan menyentuh aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan. Potensi keterlibatan dan integrasi nilai kearifan lokal aktivitas masyarakat Hindu Bali Desa Pegajahan dalam pembelajaran PPKn harus dimaksimalkan oleh sekolah-sekolah di Kabupaten Serdang Bedagai.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfaqi, M. Z., Shofa, A. M. A., & Habibi, M. M. (2019). Peran Pemuda Dalam Pelestarian Wayang Suket Sebagai Aktualisasi Nilai Moral Pancasila. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 368–374.
- Aly, A. (Januari 2005). *Pendidikan Multikultural dalam Tinjauan Pedagogik*. Makalah dipresentasikan dalam Seminar Pendidikan Multikultural Sebagai Seni Mengelola Keragaman, Surakarta: Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSB-PS) Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Anas, M. (2019). Menyemai Nalar Kebhinnekaan dalam Mewujudkan Pendidikan Multikultural. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 128–140.
- Andreson, I., & Ulfa, M. (2018). Penerapan Nilai Cinta Tanah Air pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Kelas IV Sekolah Dasar. *Jurnal Gentala Pendidikan Dasar*, 3(1), 145–162.
- Budimansyah, D., & Suryadi, K. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: PPs Universitas Pendidikan Indonesia.
- Chotimah, U. dkk. (2018). Pengintegrasian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pendidikan Multikultural. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 19–25.
- Creswell, J. (2015). *Riset Pendidikan-Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif*. (H. P. Soetjipto & S. M. Soetjipto, Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Furqon. (November 2015). *Etnopedagogi: Pendekatan Pendidikan Berbudaya dan Membudayakan*. Makalah disajikan dalam Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Pedagogi, Banjarmasin: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat
- Halimah, L. & Anisah. (2018). Internalisasi Nilai Pendidikan Kewarganegaraan Pada Tradisi Pesta Laut Blanakan dalam Rangka Pengembangan Ideal Democratic Citizen. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(2), 148–160.
- Hendra., Indawadi, J., & Montessori, M. (2019). Internalisasi Nilai Religius dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Daerah Tertinggal. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 84–94.
- Ikhsan, M. A. (2017a). Fiqih HAM dan Hak Kebebasan Beribadah Minoritas Dzimmi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 34–40.
- Ikhsan, M. A. (2017b). Nilai-Nilai Cinta Tanah Air dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 108–114.
- Japar, M., Fadillah, D. N., & Lakshita, G. (2019). *Media dan Teknologi Pembelajaran PPKn*. Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- Juairiah., Yunus, Y., & Djufri. (2014). Pembelajaran Berbasis Lingkungan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Konsep Keanekaragaman Spermatophyta. *Jurnal Biologi Edukasi*, 6(2), 83–88.
- Komunitas Hindu Bali Serdang Bedagai Menjaga Warisan Pura Dharmaraksaka.. Magribi, A. (Mei 2019). *medan.tribunnews.com*. <https://medan.tribunnews.com/2019/05/21/komunitas-hindu-bali-serdangbedagai-menjaga-warisan-pura-dharmaraksaka?page=all>
- Lubis, M. A. (2019). *Pembelajaran PPKn di SD/MI Kelas Rendah*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Najmina, N. (2018). Pendidikan Multikultural Dalam Membentuk Karakter Bangsa Indonesia. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 52–56.
- Perangin-angin, R. B. B. (2017). Pengembangan Pembelajaran PPKn Berbasis Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Kompetensi Civic-Skill Mahasiswa Jurusan PPKn Unimed. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 151–160.
- Ramdani, E. M. (2019). Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Terhadap Sikap Religius Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 37–48.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78
- Setiawan, D. (2012). *Integrasi dan Identitas Kebangsaan Belajar Budaya Kewarganegaraan*. Medan: Perdana Mulya Sarana.

- Sibarani, R. (2012). *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan (ATL).
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharyanto, A. (2013). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 1(2), 192–203.
- Supangat, & Halimi, M. (2017). Pembudayaan Demokrasi Di Pesantren Dalam Mengembangkan Civic Disposition Santri. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 75–80.
- Suprayekti; dkk. (2009). *Pembaharuan Pembelajaran di SD*. Universitas Terbuka.
- Sutijo, P. (2010). *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Grasindo.
- Thamrin, D. (2017). Membuka Ruang Baru Demokrasi Partisipatif bagi Community Policing: Peran Forum Warga. *Jurnal Keamanan Nasional*, 3(1), 63–84.
- Totok, T. (2017). Peran Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Peneguhan Masyarakat Multikultural Indonesia: Prospek di Tengah Desakan Budaya Global. *PIONIR: Jurnal Pendidikan*, 6(2), 150-165.
- Wahab, A. A. S. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Winataputra, U.S.(2015). *Pendidikan Kewarganegaraan: Refleksi Historis-Epistemologis dan Rekonstruksi untuk Masa Depan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Wiranata, I. R. & M. (2018). Kerukunan Antarumat Beragama Sebagai Dasar City Branding Harmoni Kediri The Service City. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 64–73.